

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk pedesaan sangat bergantung pada alam dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena alam menyediakan sumber daya penting untuk mata pencaharian mereka. Sebagian besar penduduk di daerah pedesaan, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, bergantung pada produk alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maraknya pertanian di Indonesia mendorong masyarakat pedesaan untuk mengolah lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Beberapa orang menekuni karier di bidang pertanian semata-mata karena latar belakang pendidikan mereka.

Signifikansi ekonomi sektor pertanian dalam suatu negara dapat diukur dari porsi substansial Produk Domestik Bruto (PDB) yang diatribusikan ke sektor ini. Kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDB menunjukkan bahwa negara tersebut sebagian besar adalah agraris, sedangkan kontribusi yang minimal menunjukkan negara yang terindustrialisasi (Nurmala Tati, dkk, 2012).

Luasnya lahan persawahan di Indonesia belum mampu meningkatkan taraf hidup petani, bahkan masih banyak petani yang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi sering dialami petani padi di pedesaan, sebagian karena meningkatnya biaya hidup dan krisis ekonomi yang belum teratasi. Kondisi ini semakin memperparah tantangan yang dihadapi petani miskin dalam

meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga mereka. Pembangunan ekonomi pedesaan dapat mengalami kemajuan atau perubahan jika bergantung pada sumber daya alam dan program pengentasan kemiskinan.

Sektor pertanian secara historis sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Pada tahun 2016, sektor pertanian menyumbang 13,45 persen dari PDB, turun dari 22,09 persen pada tahun 1991 (Waluyo, 2017). Meskipun mengalami penurunan, sektor pertanian tetap menjadi penyedia lapangan kerja utama, terutama di daerah pedesaan, yang menyerap tenaga kerja terbesar.

Pertanian merupakan sektor penting yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Wonodadi. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wono Asri adalah salah satu organisasi kunci yang memainkan peran vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di desa tersebut. Namun, seperti banyak kelompok tani lainnya di daerah pedesaan, Gapoktan Wono Asri menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensi mereka.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, pemberdayaan Gapoktan Wono Asri masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan di kalangan petani, serta kendala birokrasi dalam pelaksanaan program.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan Gapoktan Wono Asri sangat penting untuk menciptakan sektor pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan

mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui penyediaan infrastruktur, pelatihan, akses teknologi, pembiayaan, pengembangan pasar, dan kebijakan yang mendukung, pemerintah berusaha membantu Gapoktan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Gapoktan Wono Asri dapat menjadi motor penggerak pertanian di Desa Wonodadi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

Di daerah pedesaan, pertanian sangat penting karena menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk. Sepanjang sejarah, sektor pertanian telah menjadi sumber utama lapangan kerja di Indonesia. Masih banyak penduduk pedesaan yang mampu dan bersedia untuk terlibat dalam kegiatan pertanian. Pada tahun 2017, sekitar 39,68 juta penduduk Indonesia atau 31,86 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 124,54 juta orang bekerja di sektor pertanian (Suhariyanto, 2017).

Pemberdayaan petani dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas internal petani dan memperluas akses mereka ke sumber daya produktif dan peluang bisnis. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pembangunan pertanian dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian telah muncul sebagai komponen penting dari agenda operasional ini.

Kelompok pertanian bertindak sebagai platform untuk menyebarkan informasi kepada petani secara kolektif, memungkinkan perusahaan pertanian untuk secara signifikan meningkatkan produksi beras dengan bergabung

dengan kelompok-kelompok ini. Selain itu, kelompok petani berfungsi sebagai platform untuk belajar, mengorganisir, dan membina kolaborasi antar petani, memainkan peran penting dalam masyarakat pedesaan. Melalui partisipasi kelompok, semua kegiatan dan tantangan pertanian dapat ditangani secara kolektif dan efisien.

Berdasar permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian. Penelitian ini diajukan sebagai skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GAPOKTAN WONO ASRI DI DESA BAOSAN LOR, KECAMATAN NGRAYUN, KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat melalui Gapoktan Wono Asri di Desa Baosan lor, Ngrayun, Kabupaten Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat melalui Gapoktan Wono Asri di Desa Baosan lor, Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga yang dapat bermanfaat sebagai pengetahuan akademis bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Wawasan ini berharga baik dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks kuliah umum tentang strategi pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pertanian untuk meningkatkan produksi padi melalui penerapan inisiatif Gapoktan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai data, umpan balik, dan musyawarah bagi masyarakat pertanian untuk meningkatkan produksi padi dengan berpartisipasi dalam inisiatif kelompok petani.

E. Penegasan Istilah

a) Peran

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Peranan ini didefinisikan oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.

b) Pemerintah Desa

Istilah "Desa" mengacu pada masyarakat dengan adat istiadat dan peraturannya sendiri, yang juga dikenal sebagai "desa." Di Indonesia, desa diakui sebagai badan publik dengan kewenangan hukum atas batas-batas teritorialnya. Desa bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan lokal, mempromosikan inisiatif masyarakat, melindungi hak-hak tradisional, dan menegakkan tradisi budaya dalam kerangka pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Hal ini diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk terlibat dalam kegiatan bermanfaat yang memungkinkan masyarakat mencapai peningkatan kualitas hidup melalui upaya yang berdedikasi. Tindakan memberdayakan masyarakat melibatkan upaya untuk meningkatkan penghargaan dan status segmen populasi yang kurang istimewa, meskipun keterbatasan inheren mereka mencegah mereka mengatasi siklus kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan individu tetapi juga memperkuat struktur sosial yang ada. Proses pemberdayaan menggarisbawahi pelaksanaan inisiatif pembangunan yang berkontribusi pada perkembangan masyarakat.

d) Gapoktan

Kelompok Petani, juga dikenal sebagai Poktan, adalah kolektif petani, peternak, dan pekebun yang didirikan pada premis kepentingan bersama, kondisi sosial dan ekonomi bersama, serta sumber daya dan komoditas serupa. Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kegiatan anggotanya, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pelatihan Kelompok Pertanian dan Kelompok Gabungan Petani.

F. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah Desa

Konsep peran terkait erat dengan status, karena individu memenuhi hak dan tanggung jawabnya berdasarkan status dan perannya. Ketergantungan antara status dan peran terlihat jelas, karena keduanya saling bergantung. Penting untuk mempertimbangkan apakah peran dapat ada tanpa jabatan, atau sebaliknya. Sama seperti jabatan, peran dibentuk oleh berbagai pengalaman dan asosiasi dalam kehidupan individu. Hal ini menyoroti bagaimana peran menentukan tindakan masyarakat dan peluang yang tersedia bagi publik. Istilah "Pemerintah" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "to govern," yang mencakup beberapa aspek utama:

- a) Menjalankan kewenangan pemerintahan.
- b) Menetapkan sistem pemerintahan.

- c) Menjalankan fungsi atau menegakkan hukum.
- d) Mengatur wilayah atau negara untuk pemerintahan.
- e) Pemerintah terdiri dari individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangan dan mengawasi administrasi hukum dalam suatu negara.

Dalam bahasa sehari-hari, istilah “pemerintah” dan “administrasi” sering dianggap sinonim, meskipun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Bayu Suryaningrat (1980:1) menjelaskan perbedaan antara kedua istilah ini dengan menunjukkan bahwa “tata kelola” menunjukkan suatu entitas atau mekanisme yang menjalankan fungsi tertentu, sedangkan “pemerintahan” dapat dilihat sebagai konsep yang lebih luas. Istilah “pemerintah” dapat ditafsirkan dalam arti sempit atau luas, dengan konotasi pertama dalam hukum negara positif Indonesia kontemporer mengacu pada presiden atau badan eksekutif, dan yang terakhir mencakup kekuasaan seperti Trias Politica-cabang Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial. Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa didukung oleh unit desa yang bertindak sebagai fasilitator Pemerintah Desa. Sistem ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 di Indonesia berkaitan dengan penegakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa, merupakan satuan dalam komunitas hukum adat, yang diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kesejahteraan penduduk setempat berdasarkan tradisi lokal yang diakui secara lokal atau diintegrasikan ke dalam kerangka pemerintahan nasional di daerah kabupaten atau kota, sesuai dengan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip yang mendasari organisasi tata kelola desa meliputi pertimbangan keragaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 memberikan otonomi kepada pemerintah desa atau entitas lain yang ditunjuk oleh mereka, memungkinkan pendelegasian tugas-tugas pemerintah tertentu. Kerangka legislatif ini, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, membentuk Badan Permusyawaratan Desa badan-badan serupa dengan konteks budaya tertentu desa. BPD bertindak sebagai badan pengawas dan pengatur dalam struktur pemerintahan desa, mengawasi pembentukan Serikat Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa. Selain itu, sebuah lembaga masyarakat didirikan di desa untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, pemerintah desa, bersama dengan aparat desa dan anggota BPD, memimpin proses administrasi desa.

Kepala desa, dalam perannya, memikul tanggung jawab terhadap penduduk desa, memastikan bahwa tugasnya dikomunikasikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Desa diberi mandat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terperinci kepada Dewan Penasihat Desa, serta menginformasikan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip yang memandu tanggung jawabnya. Selain itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanyakan atau meminta informasi lebih lanjut melalui Badan Permusyawaratan Desa mengenai tanggung jawab yang relevan.

Sebagaimana diatur dalam Sesuai dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11, pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia yang disebutkan di atas, sebuah desa secara resmi diakui sebagai badan hukum dengan batas-batas wilayah tertentu, dipercayakan dengan tata kelola dan kesejahteraan penduduk setempat sesuai dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang ditegakkan dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Bertugas mengelola dan melayani kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia, Pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, berfungsi sebagai inti administrasi pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa, juga dikenal sebagai BPD, mewakili demokrasi dalam organisasi pemerintah desa sebagai komponen penting.

Alokasi Dana Desa merupakan ketentuan keuangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang berasal dari segmen dana bantuan keuangan pusat dan daerah yang ditujukan kepada Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang biasa disebut dengan APB Desa, berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dirumuskan dan disetujui melalui upaya kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Ordonansi Desa. Ordonansi Desa berdiri sebagai persyaratan legislatif yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa, menguraikan pedoman dan protokol yang harus diikuti dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa, APB Desa, dan Ordonansi Desa secara kolektif membentuk kerangka kerja yang

mengatur operasi keuangan dan proses pengambilan keputusan dalam yurisdiksi desa, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan atau kedudukan budaya kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti mereka yang mengalami masalah seperti kemiskinan. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk membawa perubahan sosial yang positif yang membuat individu merasa berdaya, dengan kapasitas untuk membuat keputusan yang tepat dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka di bidang-bidang seperti kesejahteraan fisik, stabilitas keuangan, dan hubungan sosial (Sofa, 2015).

Di sisi lain, pemberdayaan publik mengacu pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan, untuk mengakses sumber-sumber kekuatan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, meminta pertanggungjawaban para pihak pembuat keputusan, dan membuat pilihan yang tepat dengan dukungan lembaga-lembaga lokal (Bhimo, 2012). Menurut Bank Dunia (dikutip dalam Ayuningtyas, 2014), pemberdayaan adalah tentang memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan (seperti orang miskin) sehingga mereka dapat dengan percaya diri menyuarakan pendapat, ide, dan

preferensi mereka, serta membuat pilihan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu proses bertahap yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pola pikir warga masyarakat.

Menurut Widjaja (dikutip dalam Ayuningtyas, 2014), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat, sehingga mampu mencapai jati diri, kehormatan, dan martabatnya secara maksimal, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Di pedesaan, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan berusaha, atau penyediaan modal, tetapi juga memerlukan perubahan sosial dalam kerangka sosial ekonomi untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas, dan efisiensi.

Pemberdayaan masyarakat pertanian melibatkan Memfasilitasi akses ke sumber daya bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam masyarakat pertanian melalui promosi produktivitas dan kemandirian. Dengan memungkinkan entitas ini untuk mengakses alat, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan, menjadi mungkin untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan, yang mengarah pada hasil positif bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor pertanian. (Rahayu, 2010).

Fase inisiatif pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan oleh Totok dan Poerwoko, 2013 (dikutip dalam Ayuningtyas, 2014) untuk setiap

individu dalam suatu organisasi mewakili perkembangan tindakan yang berurutan: Pertama, menumbuhkan keinginan dalam diri sendiri untuk berkembang dan meningkatkan, yang berfungsi sebagai dorongan awal untuk mencari pemberdayaan. Selanjutnya, memelihara kesiapan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kenyamanan atau rintangan yang dirasakan, dan kemudian membuat komitmen untuk merangkul pemberdayaan dengan tujuan menghasut peningkatan yang diantisipasi. Kemudian, mengasah kemampuan untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan yang menghasilkan keuntungan atau peningkatan dalam situasi. Selanjutnya, mengambil peran atau keterlibatan yang lebih terlibat dalam inisiatif pemberdayaan yang telah diakui menguntungkan. Selanjutnya, meningkatnya keterlibatan dan dedikasi terhadap kegiatan pemberdayaan, sebagaimana dibuktikan dengan munculnya motivasi untuk perubahan. Pada akhirnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pemberdayaan.

Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang memiliki perasaan yang sama atau rasa persatuan karena kesamaan identitas, minat, rasa memiliki, dan biasanya bertempat tinggal di lokasi yang sama (Suyanto, 2002). Sudah menjadi sifat manusia untuk membutuhkan interaksi sosial dan persahabatan, yang mengharuskan hidup bersama atau berkelompok untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu, sehingga terlibat dalam interaksi timbal balik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dalam pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, yang mewujudkan pendekatan pembangunan baru yang dicirikan sebagai "berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan". Konsep ini melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar atau penyediaan mekanisme jaring pengaman untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut dengan menawarkan alternatif bagi model pertumbuhan tradisional. Konsep ini telah dibentuk oleh kontribusi banyak ahli dan praktisi yang mencari apa yang disebut Friedman sebagai pembangunan alternatif, yang menuntut 'demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang tepat, kesetaraan gender, dan kesetaraan antargenerasi' (Friedman dalam Ginanjar. 2009).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini masih terjerumus dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memfasilitasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Suyanto (2002), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan mengenali dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

Mendalami konsep pemberdayaan memerlukan eksplorasi terhadap inti gagasannya, yaitu kekuasaan. Suyanto (2002) mengemukakan bahwa pemahaman tentang pemberdayaan dalam kaitannya dengan kekuasaan dapat

dikaji melalui empat perspektif yang berbeda, yaitu sudut pandang pluralis, elitis, strukturalis, dan pascastrukturalis.

Jika dilihat dari sudut pandang pluralis, pemberdayaan masyarakat digambarkan sebagai suatu proses yang membantu kelompok masyarakat dan individu yang terpinggirkan agar dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain. Bantuan ini meliputi pemberian pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan lobi, pemanfaatan media untuk advokasi, keterlibatan dalam aksi politik, pemahaman tentang cara kerja sistem (yang dikenal sebagai "aturan main"), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing dengan cara yang tidak membuat siapa pun muncul sebagai pemenang atau pecundang. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat memerlukan pendidikan bagi kelompok atau individu tentang cara terlibat dalam persaingan dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat, jika dikaji melalui sudut pandang elitis, melibatkan upaya untuk berkolaborasi dengan dan memengaruhi mereka yang berada dalam posisi istimewa, menjalin kemitraan, menghadapi isu, dan mengadvokasi perubahan dalam lingkaran elit. Dominasi kaum elitis di berbagai sektor seperti media, pendidikan, politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen dapat membuat masyarakat tidak berdaya. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang strukturalis menghadirkan tugas yang lebih berat, yang membutuhkan pemberantasan bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Masyarakat merasa dibatasi oleh struktur yang berlaku

yang melanggengkan penindasan berdasarkan faktor-faktor seperti kelas, gender, ras, atau etnis. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan perjalanan menuju pembebasan, mendorong transformasi struktural yang mendasar, dan menantang bentuk-bentuk penindasan sistemik.

Jika dilihat melalui perspektif pasca-strukturalis, pemberdayaan masyarakat muncul sebagai proses yang berpusat pada interogasi dan transformasi wacana. Di sini, penekanannya terletak pada dimensi intelektual daripada pada tindakan praktis. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mendorong pemahaman dan mendorong cara berpikir baru, analitis, dan edukatif, bukan sekadar berfokus pada tindakan langsung.

Dalam konteks pemberdayaan, berbagai faktor harus diperhatikan. Pemberdayaan masyarakat Desa ditujukan untuk mendorong tindakan kolektif di

- 1) Desa, meliputi tata kelola lembaga masyarakat Desa dan lembaga adat, serta sistem ekonomi dan lingkungan yang terpadu. Inisiatif ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 126, bagian ketiga, ayat 1).
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta lembaga pemerintahan seperti Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta pihak ketiga. Strategi ini dirinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014, yang menekankan upaya kolaboratif berbagai pemangku kepentingan dalam memberdayakan masyarakat Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 Undang-Undang tentang Desa.

- 3) Peningkatan masyarakat desa yang disebutkan dalam ayat (1) melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok masyarakat lainnya yang berkontribusi terhadap upaya pemerintah dan pembangunan secara komprehensif. Pendekatan holistik pemberdayaan ini digambarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 126, bagian ketiga ayat 1).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menggambarkan suatu konsep atau variabel, yang memungkinkan kuantifikasinya melalui pemeriksaan dimensi-dimensinya (indikator). Dimensi-dimensi ini dapat mencakup perilaku, aspek, atau sifat. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional berkaitan dengan suatu konsep yang menjelaskan implementasi inisiatif pemberdayaan perempuan dalam ranah Pelatihan membatik komunitas perempuan. Indikator- indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peran atau upaya yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan program pemberdayaan Gapoktan sangat penting.

- 2) Pemberdayaan masyarakat pertanian melibatkan Memfasilitasi akses ke sumber daya bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam masyarakat pertanian melalui promosi produktivitas dan kemandirian.
- 3) Memberdayakan kelompok petani sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat.
- 4) Pemberdayaan berfungsi sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik pada tingkat keluarga maupun dalam skala yang lebih luas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, dengan tujuan utama menggambarkan keadaan yang ada dan peristiwa masa lalu. Penelitian deskriptif berfungsi sebagai metode pemecahan masalah yang melibatkan eksplorasi dan ilustrasi berbagai subjek dan objek studi (seperti individu, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini, berdasarkan bukti yang dapat diamati (Moleong, 2021). Akibatnya, peneliti dapat memperoleh wawasan komprehensif tentang masalah yang sedang diperiksa. Dalam hal ini, para peneliti berusaha untuk mengumpulkan wawasan terperinci tentang peran yang dimainkan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, penentuan lokasi ini karena pentingnya pemberdayaan masyarakat: Program pemberdayaan melalui Gapoktan merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial.

3. Teknik Penentuan Informan

Metode yang digunakan untuk memilih informan melibatkan purposive sampling, khususnya menargetkan individu yang memberikan data dengan pertimbangan tertentu, dengan fokus pada pihak yang benar-benar terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Baosan Lor
2. Perangkat Desa Baosan Lor
3. Pengurus Gapoktan
4. Poktan Desa Baosan Lor

Informan yang disebutkan di atas memainkan peran penting karena mereka diidentifikasi sebagai individu yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait yang penting untuk mengumpulkan data selama wawancara yang dilakukan oleh penyelidik yang berwenang. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan diperiksa secara menyeluruh dan dapat dikomunikasikan secara efektif, dengan fokus pada kejelasan dan ketepatan, setelah mencapai kesimpulan dari prosedur

investigasi. Kerjasama informan dan kemauan untuk memberikan informasi yang akurat dan terperinci adalah komponen penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan keseluruhan proses investigasi dan penyajian temuan selanjutnya..

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data dalam proyek penelitian saat ini melibatkan melakukan penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lingkungan alam atau pengaturan dunia nyata melalui pengamatan, wawancara, dan survei, di antara teknik lainnya. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memperoleh data langsung yang kaya secara kontekstual dan mencerminkan kompleksitas yang ada dalam situasi kehidupan nyata, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.

a. Observasi

Pengamatan berfungsi sebagai teknik untuk mengumpulkan data, digunakan dalam akuisisi data penelitian melalui saksi dan penginderaan langsung (Bungin, 2015). Para peneliti mengamati, mendengarkan, dan merasakan fenomena secara visual, yang kemudian direkam secara subyektif. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, yang dirancang secara metodis untuk merinci apa yang diamati, serta waktu dan lokasi pengamatan. Melalui penerapan metode pengumpulan data observasional, peneliti dapat menjelaskan keadaan yang berlaku di bidang

penelitian. Ini, pada gilirannya, membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi otentik dan tepat yang diperlukan.

b. Wawancara

Dalam wawancara, terjadi dialog terstruktur antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan (Herdiansyah, 2018). Selanjutnya, peneliti merumuskan pertanyaan dan menyajikannya secara sistematis, sehingga memperoleh jawaban langsung dari narasumber. Setelah tanggapan diterima dari narasumber, semua data yang terkumpul didokumentasikan dengan cermat dan dilakukan analisis.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti dan data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang subjek melalui materi tertulis. Dokumen didefinisikan sebagai catatan tertulis apa pun yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, apakah sengaja disiapkan atau tidak untuk tujuan penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai konsolidasi data atau jurnal yang berisi catatan rinci peneliti, bersama dengan gambar atau foto pendukung untuk data penelitian. Metode ini melibatkan pemeriksaan dan pemanfaatan berbagai dokumen resmi, laporan, peraturan, dan arsip untuk mengekstrak informasi yang relevan yang secara teoritis dapat mendukung data penelitian. Peneliti juga dapat memasukkan dokumentasi dalam bentuk foto atau video selama kegiatan penelitian mereka. Dengan mempelajari dokumentasi, peneliti

dapat mengekstrak informasi berharga dari sumber-sumber seperti surat, buku harian, arsip, risalah rapat, dan log aktivitas.

5. Subyek Penelitian

Pemilihan informan Penelitian informan pemilu menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugianto dalam buku "Pengertian Studi Kualitatif", sebagai metode pemilihan sumber data sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa individu yang memiliki pengetahuan terbanyak tentang pokok bahasan atau memiliki posisi otoritas yang memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, informan adalah individu yang dipilih oleh peneliti karena kemampuannya dalam memberikan informasi yang esensial. menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugianto dalam buku "Pengertian Studi Kualitatif", sebagai metode pemilihan sumber data sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa individu yang memiliki pengetahuan terbanyak tentang pokok bahasan atau memiliki posisi otoritas yang memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, informan adalah individu yang dipilih oleh peneliti karena kemampuannya dalam memberikan informasi yang esensial.

6. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan metodologi analisis data deskriptif kualitatif, pendekatan sistematis yang memerlukan pemeriksaan dan pengorganisasian semua data yang dikumpulkan dengan cermat untuk mendapatkan wawasan yang berarti dan menarik kesimpulan. Metodologi ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan, yang pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan kekayaan temuan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memberikan deskripsi menyeluruh dan penjelasan data yang berkaitan dengan situasi tertentu, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang materi pelajaran. Metode analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam data yang dikumpulkan, menawarkan wawasan dan interpretasi yang berkontribusi pada penggambaran yang kaya dan terperinci dari skenario spesifik yang sedang diteliti. (Moleong, 2011).

Milles dan Huberman menguraikan tahapan-tahapan yang terlibat dalam analisis data kualitatif sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

- 1) Pengumpulan data melibatkan pemrosesan dan persiapan data untuk analisis. Fase ini mencakup tugas-tugas seperti transkripsi wawancara, pemindaian materi, pengetikan data lapangan, atau penyortiran dan pengkategorian data berdasarkan sumbernya.
- 2) Reduksi data adalah proses analitis yang melibatkan pengkategorian, pengarahannya, pembuangan informasi yang tidak perlu, dan pengorganisasian

data yang diringkas untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil yang diamati, yang kemudian menjadi tematik.

- 3) Penyajian data memerlukan penyajian data yang dianalisis dalam berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan melalui deskripsi ringkas, tabel, bagan, dan pembentukan hubungan antara berbagai kategori.
- 4) Penarikan kesimpulan memerlukan tindakan menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat tentatif dan dapat direvisi jika bukti signifikan yang mendukung fase pengumpulan data berikutnya tidak ada. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dibuat untuk mengatasi pernyataan masalah yang ditetapkan sejak awal.

7. Teknik Keabsahan Data

Tes validitas dalam penelitian kualitatif mencakup penilaian validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas (Sugiyono, 2017). Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan tes kredibilitas untuk memastikan validitas data, menggunakan triangulasi. Triangulasi melibatkan meneliti data dari berbagai sumber dan pada titik waktu yang berbeda. Validitas data melibatkan tiga bentuk triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian khusus ini, triangulasi sumber digunakan. Sesuai Sugiyono (2017), triangulasi sumber untuk menilai kredibilitas data melibatkan verifikasi data

yang diperoleh dari berbagai sumber. Studi ini melibatkan referensi silang data dari peserta melalui triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas data.

